HIDUP JEMAAT DI ALAM PARTISIPATIF DAN TRANSFORMATIF

ST. GITOWIRATMO, PR

Predikat "transformatif" dan "partisipatif", yang diterjemahkan menjadi"mengembangkan" dan "mengikutsertakan" sangat populer dalam lima tahun terakhir ini di kalangan jemaat Keuskupan Agung Semarang. Mengapa? Karena istilah itu tercantum di dalam Arah Dasar Keuskupan Semarang yang berlaku dari tahun 1995 – 2000. Kedua istilah itu dikaitkan dengan pola kepemimpinan dalam jemaat yang secara kultural dan tradisional memang cenderung ke arah sentralistik (klerikal) yang biasanya melekat pada diri hierarki. Latar belakang perumusan Arah Dasar tersebut ialah model kepemimpinan yang memang semasa Orde Baru bernuansa sangat sentralistik (tergantung pada satu/sekelompok orang). Nuansa demikian masuk dalam Gereja dengan mudah karena Gereja sendiri mempunyai ciri hierarkis yang sangat mudah bersenyawa dengan unsur sentralistik tersebut, ditambah lagi kultur neo-feodal yang menyuburkan nuansa tersebut di atas.

Permasalahan

Masalah utama dicantumkannya kedua predikat itu pada soal kepemimpinan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ini: Apakah praksis kepemimpinan yang dijalankan di kalangan jemaat mampu mengembangkan jemaat di dunia modern ini? Pertanyaan ini dirumuskan atas keluhan atau kritikan jemaat terhadap gaya dan fungsi kepemimpinan yang mereka alami. Jemaat modern yang berpandangan kritis menangkap suatu fenomen gaya kepemimpinan atau model pelaksanaan *leardership* yang tidak mengembangkan (transformatif) dan mengikutsertakan (partisipatif) seluruh jemaat. Dalam Gereja, jemaat sudah terbiasa dengan pola hubungan satu arah atas-bawah yang membawa nuansa "penekanan" dan kekerasan *leader* atas komunitasnya. Arti ke-

pemimpinan disempitkan pada "kekuasaan atau wewenang" yang bernada sosiologis sehingga terlupakan sifat khas kepemimpinan jemaat, yakni pelayanan. Padahal, untuk itulah seseorang menerima jabatan hierarkis (*bdk.* LG 18). Dampak sampingan dari paham sempit seperti itu ialah terbentuk dalam Gereja suatu sistem birokrasi yang mengutamakan prosedur sedemikian rupa sehingga tatanan hidup jemaat menjadi kaku dan beku.

Persoalan praksis kepemimpinan berkait erat dengan masalah pola komunikasi dalam komunitas jemaat. Pola komunikasi yang dikembangkan dalam praksis "otoriter" adalah pola satu arah dengan fungsi *leader* sebagai "pemberi petunjuk". Dengan demikian, satu hal penting untuk hidup bersama seperti musyawarah (yang intinya membudayakan "dialog- rembug bersama") berubah esensi menjadi paduan suara satu nada: "setuju"! Akibatnya: ruang berkreasi ditutup, interupsi dicela, perbedaan tidak menjadi berkat tetapi menjadi kutuk.

Gaya kepemimpinan demikian dalam bentuknya yang halus mudah sekali disenyawakan dengan fungsi dalam jemaat yang dalam gambar-gambar injili disebut dengan gembala, *presbyter, episkopos*, dan lain-lain, atau dengan istilah populer "kepemimpinan hierarkis". Yang lebih hebat lagi adalah bila persenyawaan itu terjadi dengan unsur kultural seperti mentalitas feodalistik dan paternalistik sehingga kepemimpinan hierarkis seakan-akan sama dengan birokrat dan lupa bahwa fungsi hierarki sebenarnya adalah pemersatu jemaat beriman "yang tampak dan bersifat sosial" yang bersumber pada kekuatan Roh Kudus (*bdk.* LG 9).

Kalau teori-teori sosiologis benar bahwa praksis kepemimpinan dan gaya hidup komunitas/masyarakat itu berkaitan sangat erat dan saling menentukan seperti *a.l.* dikemukakan oleh Evelyn Eaton Whitehead[1], maka akar masalah praksis kepemimpinan dalam jemaat berkait dengan pertanyaan: apakah jemaat kita (Gereja) memang mempunyai karakter "partisipatif" dan "transformatif", ataukah jemaat kita lebih mengadopsi paham paternalistik dan sentralistik sehingga suasana yang partisipatif dan transformatif tidak tumbuh.

Gereja: Terlibat dan Mengembangkan

Pertanyaan yang penting di sini ialah: apakah "partisipatif" dan "transformatif" itu melekat pada hakikat Gereja, ataukah sekadar tambahan dari luar, khususnya dari perkembangan realitas sosiologis di Indonesia sekarang ini. Dengan dua kata kerja "terlibat" dan "mengem-

bangkan" dalam sub-judul ini, mungkin kita dibantu untuk menjawab pertanyaan itu. Hanya saja, objek dan keterangan dari kedua kata kerja itu belum jelas. Untuk menjelaskan objek dan keterangan itu, mungkin perlu dikemukan beberapa hal di bawah ini.

1. Dari gerak internal gerejawi (jemaat), kata "terlibat" dan "mengembangkan" menggambarkan suatu suasana hidup menjemaat yang bergerak dinamis. Hidup menjemaat terasa menggairahkan karena semua dan setiap orang mendapat kesempatan untuk menungkapkan imannya secara aktif. Pengungkapan iman itu, tidak hanya melalui keterlibatan sebagai peserta (massa), tetapi juga sebagai fungsionaris tertentu yang diberi tanggung jawab lebih besar demi kepentingan seluruh jemaat, termasuk di dalamnya adalah fungsi kepemimpinan. Dalam suasana seperti itu, karisma-karisma dalam jemaat sebagai anugerah Roh Kudus (*bdk.* 1Kor 12:1–11) dikembangkan dan ditata (*bdk.* LG 12) demi kepentingan seluruh jemaat pula. Kelihatan di sini bahwa dari sudut praksis hidup menjemaat, inti pokok Gereja sebagai *communio* adalah terlibat dan mengembangkan. Mengalir dari semangat *communio*, Konsili Vatikan II membahas banyak tema, juga tema hierarki, khususnya episkopat dengan kolegialitasnya, para imam dengan *presbyteriumnya,* dan bermacam-macam hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam tubuh Gereja, bahkan juga hubungannya dengan dunia ini. Maka, sebenarnya tidak ada *communio* tanpa partisipasi dan transformasi. Dalam suasana itu, pola relasi yang dikembangkan menjadi multiarah dan multipusat, bukan satu arah dan satu pusat (sentralistik). Pola komunikasi menjadi dialogal: mengandalkan sumbangan pemikiran dalam suatu proses musyawarah demi kepentingan bersama. *Leadership* dalam hal itu berfungsi sebagai pemudah bagi terlaksananya proses komunikasi, sambil menjaga supaya tidak kehilangan arah/tujuan bersama. Suasana tersebut akan mudah bersenyawa dengan prinsip-prinsip yang sangat ditekan oleh kaum reformis: asas transparansi, akuntabilitas, kompetensi, desentralisasi, kebebasan, dan lain-lain. Hampir menjadi "trend" zaman sekarang bahwa kepemimpinan jemaat pun disorot dari asas-asas tersebut, walau identitas spiritualnya tetap dijunjung tinggi![2]

2. Bicara mengenai gerak Gereja di dunia, kita tidak boleh melupakan tulisan Pendeta E. Gerrit Singgih Ph.D yang menggunakan istilah "reformasi" dan "transformasi" untuk menguraikan sifat Gereja yang diakonal (pelayanan).[3] Nada dasar tulisan tersebut: dalam pelayanannya, Gereja mesti tanggap terhadap masalah-masalah aktual dan kon-

tekstual dan mengarahkan pelayanannya ke arah "transformasi sosial" demi kehidupan yang lebih manusiawi. Nada dasar semacam itu sebenarnya sudah disuarakan secara gamblang sekitar 30 tahun lalu ketika para uskup Asia membentuk Federasi Konperensi Uskup Asia (FABC). Sejak awal, dokumen-dokumen FABC menegaskan bahwa Gereja di Asia berhadapan dan sibuk dengan masalah hubungan antaragama (dialog), inkulturasi, serta masalah kemiskinan. Pergulatan bangsa Asia adalah pergulatan pembebasan kemanusiaan dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah diakonal di atas. Dengan demikian, Gereja Asia yang diakonal adalah Gereja yang partisipatif terhadap usaha-usaha pembebasan itu. Tidak ketinggalan ilmu-ilmu teologi di Asia pun ikut serta mencari solusi atas problematik Asia melalui usaha refleksi tentang kekristenan secara kreatif. Dari latar belakang pemikiran semacam itu, mungkin dapat dimengerti bahwa istilah "terlibat" dan "mengembangkan" berkaitan dengan suatu fungsi keberadaan Gereja di tengah usaha untuk membangun hidup bersama yang lebih menyenangkan dan terbebas dari bermacam-macam bentuk kemiskinan dan pemiskinan. Keikutsertaan Gereja sebagai "partisipan aktif" dalam transformasi sosial ke arah kehidupan manusia yang bermartabat merupakan wujud dari karakter Gereja yang diakonal dan partisipatif. Gereja disebut sebagai "partisipan aktif" karena proses transformasi kehidupan ini menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat di mana jemaat menjadi bagian integralnya (termasuk di dalamnya para pemimpinnya). Dalam hal ini, Gereja tidak mungkin bergerak sendiri dan mau tidak mau mesti bekerja sama secara ikhlas dan jujur dengan semua pihak. Kesadaran sosial semacam ini menimbulkan rangsangan baru di kalangan umat untuk memikirkan bagaimana seharusnya menjadi murid Kristus pada zaman sekarang. Ini melahirkan bermacam-macam gerakan kemanusiaan dan sosio-pastoral, entah berciri lembaga seperti LSM, atau berciri spontan seperti gerakan-gerakan akar rumput yang berbasis pada kelompok-kelompok kecil yang kadang berciri sesaat (aksidental). Sehubungan dengan ini, pemikiran Romo Y.B Mangunwijaya, Pr dalam buku *Gereja Diaspora* (1999) memberi refleksi yang jelas mengenai ciri Gereja yang berpola partisipatif dan transformatif di atas. Tinjauan kritis atas *Gereja Diaspora* hampir seluruhnya berbicara mengenai Gereja yang ikut aktif dalam gerak pembebasan manusia secara holistik dan itulah gambar sebuah Gereja yang bisa disebut partisipatif dan transformatif serta kontekstual.[4] Gereja demikian adalah Gereja yang mewujud dalam bentuk *basic human communities* (komunitas yang berdasar pada kemanusiaan). Dengan demikian, fungsi keberadaan Gereja

dan misinya memang "bersifat religius dan justru karena itu juga sangat manusiawi" (GS 11).

Hingga kini, keterlibatan dan partisipasi dalam perjuangan demi pembebasan tetap merupakan kepedulian utama Gereja, khususnya di Keuskupan Agung Semarang (KAS), sebagaimana jelas dirintis dalam usaha-usaha pastoral komisi-komisi yang tergabung dalam Dewan Karya Pastoral. Selain itu, masih ada karya-karya pastoral lain yang ditangani oleh lembaga-lembaga maupun usaha-usaha spontan dari umat untuk semakin menjabarkan keprihatinan itu.

Keprihatinan dan usaha pastoral yang diharapkan berkembang di KAS itu bukanlah persoalan khas Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Gereja-Gereja di Asia pada umumnya disibukkan oleh keprihatinan tersebut. Tema-tema teologi yang dikembangkan di Asia pun berkisah pada masalah tersebut.[5] Pemikiran-pemikiran yang kontekstual itulah yang sekarang tidak habis-habisnya dibicarakan oleh bagai kalangan dalam jemaat Kristen Asia pada umumnya. Apa yang sedang digulati oleh jemaat Kristen di tingkat Gereja lokal, seperti KAS, mencerminkan kesadaran yang makin meluas bahwa problematik manusia dan kemanusiaan adalah bagian integral dari realitas hidup orang beriman dan keberadaan jemaat beriman (Gereja). Tetapi, kekhasan teologi Kristen ialah bahwa problematik itu dilihat dalam terang misteri Kristus (*bdk.* GS 10). Di antara dua jalur ketegangan (yaitu problematik manusia dan penghayatan iman) itulah pelayanan pastoral dilakukan. Di sinilah kesibukan pastoral: mengantar jemaat menghayati misteri Kristus dalam hidup keseharian mereka dan menerangi kehidupan sehari-hari jemaat dengan cahaya Kristus yang mewartakan Kerajaan Allah. Dengan istilah yang sejajar dengan itu, P.G. van Hooijdonk menyebut tujuan umum pembangunan jemaat "mengantarai terjadinya keadilan Allah sebagai peristiwa eskatologis dalam dan lewat jemaat lokal serta dalam dan lewat sejarah manusia yang aktual".[6] Implikasi pastoral dari pemikiran ini jelas menunjuk pada apa yang kita bicarakan di atas. Demi praksis, lebih jauh dikatakan bahwa untuk keperluan itu teologi pastoral selayaknya mempergunakan jasa ilmu-ilmu sosial empirik (misalnya mempergunakan analisis sosial, ilmu-ilmu manajemen, dan lain-lain) agar lebih mampu memahami seluk-beluk kehidupan manusia dengan harapan bahwa aktivitas pastoral sanggup menanggapi keprihatinan dan kerinduan jemaat yang aktual.[7] Dengan demikian, "isi" pastoral akan jauh lebih kaya dan konkret dan menyambung pada hidup sehari-hari berkat saran-saran dari ilmu-ilmu sosial itu.

Masa Transisi

Iklim partisipatif dan transformatif yang bertiup perlahan di kalangan jemaat kini meluas semakin cepat di era reformasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Iklim demokratisasi yang disebarluaskan media massa melahirkan opini dan kesadaran baru – semacam pencerahan – tentang berbagai macam segi kehidupan manusia yang perlu ditanggapi oleh masyarakat secara bersama-sama dan komprehensif. Dalam arus semacam itu, pola pemikiran yang bersifat sektarian semakin tidak populer dan ditinggalkan orang. Segala macam bentuk pemaksaan kehendak, apalagi dengan cara kekerasan, semakin banyak dicela orang. Orang mulai tidak senang dengan segala bentuk arogansi yang otoriter. Sebaliknya, orang menginginkan transparansi, dialog-musyawarah yang sejati, kerja sama dengan mengakui subjektivitas masing-masing. Orang juga banyak bicara mengenai hak, dan bukan lagi mengenai kewajiban. Untuk menuntut hak, orang berani "demo". Dalam kegandrungan menuntut hak, mencari keadilan, dan memperjuangkan keyakinan secara bebas, kadang-kadang kelompok berkepentingan malah saling bertabrakan. Mungkin begitulah proses menemukan jalan menuju kepentingan bersama.

Kesadaran semacam itu jugalah yang dipergunakan untuk melihat secara kritis kehidupan menjemaat. Penilaian kritis mulai dilontarkan dengan lebih berani terhadap bermacam-macam kebijakan pastoral, manajemen paroki, gaya hidup pastor dan kepemimpinannya, juga mengenai profil pemimpin awam. Penilaian kritis tidak lagi dipandang negatif, tetapi dianggap sebagai salah satu cara berpartisipasi, untuk mentransformasi kehidupan menjemaat. Untuk menghindari suasana yang "kaotis" sebagai akibat samping dari semakin berkembangnya fungsi kritis dari jemaat, maka dibutuhkan semacam aturan main bersama dalam bentuk arah bersama (kadang-kadang dirumuskan dalam bentuk visi dan misi) yang ditentukan sendiri oleh komunitas beriman setempat. Begitulah proses transformasi internal jemaat sedang berlangsung. Dalam kegairahan untuk berubah itu, mungkin orang menjadi sadar juga bahwa perubahan pasti tidak dilakukan demi perubahan itu sendiri (asal berubah). Akan tetapi, dalam rangka hidup menjemaat, perubahan bertujuan agar muncullah suatu vitalitas hidup baru orang Kristen di tengah-tengah masa krisis yang sulit. Perubahan dalam hidup menjemaat akhirnya harus membantu orang untuk beriman secara lebih aktual.

Masa transisi semacam ini juga membuka kemungkinan untuk eksperimen baru dalam menerjemahkan arti hidup menjemaat dan me-

wujudkannya secara real. Kreativitas pastoral untuk mengembangkan kegairahan hidup menjemaat di sini amat diperlukan. Segala macam bentuk pembakuan dalam pastoral (misalnya kesepakatan-kesepakatan) dinilai oleh banyak pihak sebagai hal yang tidak akan menyuburkan alam partisipatif, apalagi transformatif. Hidup menjemaat adalah sesuatu yang berciri dinamis dan, oleh karena itu, terbuka pada perubahan semangat dan pengungkapan serta perwujudan imannya. Itu pulalah jiwa dari pembaharuan eklesiologi Vatikan II yang dikenal dengan istilah *aggiornamento* (peng-"hari-ini"-an). Hidup menjemaat tidak boleh usang supaya Gereja tidak kehilangan fungsi sebagai sakramen kelihatan bagi semua orang (*bdk.* LG 9). Maka, tinjauan pastoral kami terhadap hidup menjemaat tidak mengutamakan hidup organisatoris, tetapi lebih memperhatikan eksistensi sebagai murid Kristus yang "meski tidak berasal dari dunia tetapi harus hidup di dunia" (*bdk.* Yoh 17:14–15). Meski Konsili Vatikan II sudah terlaksana 35 tahun yang lalu, tetapi proses pembaruan tampaknya membutuhkan waktu lebih panjang lagi agar semangat Vatikan II benar-benar mendarah daging. Selain itu, latar belakang historis-kultural-politis kehidupan jemaat di seluruh dunia dan di seluruh kepulauan Indonesia begitu bervariasi. Akibatnya, ada jemaat yang sudah mencoba menghayati pengarahan Konsili itu, dan ada yang seakan-akan belum pernah mendengar tentang Konsili Vatikan II itu.

Pendidikan Kaum Beriman

Semangat atau jiwa/mentalitas partisipatif dan transformatif dari satu sisi seakan berbicara mengenai hal-hal yang teknis dan tidak menyentuh bagian "dalam" atau "roh" dari kehidupan jemaat, padahal sikap partisipatif dan transformatif berakar dalam "roh" yang "dalam". Proses partisipasi dan transformasi dalam hidup jemaat tidak berlangsung melalui program tempelan dari luar, tetapi melalui proses perubahan dari "dalam" diri jemaat beriman. Untuk itu, pentinglah pendidikan kaum beriman sebagai salah satu strategi ke arah partisipasi dan transformasi; dan lebih khusus lagi: pendidikan kaum awam atau – dengan istilah yang senada – pemberdayaan kaum awam. Merekalah agen-agen partisipasi dan transformasi yang sejati.

Secara doktriner, peran dan jiwa partisipatif dan transformatif kaum awam sebenarnya sudah jelas digariskan secara baik dalam Bab IV *Lumen Gentium*. Di sana, disebutkan kekhasan panggilan awam: panggilan awam bersifat keduniaan (*lih.* LG 31), dan terkait dengan

bagian dan pelayanan Gereja yang lain (*lih.* LG 33; 36). Hal tersebut masih dipertegas lagi dalam Bab II dari Anjuran Apostolik *Christifideles Laici* yang seluruhnya berbicara mengenai partisipasi kaum awam. Pertanyaan kita di sini bukanlah masalah penafsiran terhadap dogma atau magisterium itu, tetapi praksis kehidupan menjemaat; di dalam itu "nuansa awam" lebih terasa. Nuansa awam berarti suatu kultur kehidupan menjemaat; inti kebudayaan itu nilai-nilai Kerajaan Allah, tetapi perwujudan nilai-nilai tersebut mempunyai dimensi khas hidup laikal. Tanpa dimensi laikal ini, hidup Gereja bisa menjadi ibarat pulau di tengah daratan. Nuansa awami itu lebih diwujudkan, kalau diberikan lebih banyak kepercayaan kepada karisma keawaman. Memberikan kepercayaan kepada panggilan keawaman itu sebenarnya sudah merupakan bentuk pendidikan yang partisipatif dan transformatif.

Iklim yang kondusif bagi edukasi awam, selain diciptakan oleh kondisi kaum awam sendiri, juga didukung oleh sebuah faktor yang penting: perubahan praksis ke-hierarki-an. Yang kami maksudkan dengan praksis ini sebenarnya secara sederhana bisa kami sebut sebagai pola relasi yang melibatkan hierarki. Pola relasi tersebut adalah pola komunio yang bersifat dialogal, sesuai dengan eklesiologi Vatikan II. Jadi, yang perlu berubah ialah "bagaimana" hierarki menjalankan fungsi sebagai pemersatu jemaat, dan "bagaimana" jemaat mem-fungsi-kan hierarki.

Masyarakat adalah faktor lain yang penting dalam proses pendidikan kaum beriman. Tidak terlalu mudah membedakan mana yang "jemaat" dan mana yang "masyarakat". Tetapi, keduanya menunjuk satu kelompok orang yang hidup bersama-sama dalam suatu teritori atau jaringan tertentu. Hanya, jemaat sebenarnya merupakan sebuah kategori ritual sedangkan masyarakat lebih suatu kategori kultural-sosial-politik. Dengan kedua kategori ini, terungkap dua dimensi dari satu realitas hidup orang beriman. Dengan demikian, edukasi kaum beriman menyangkut edukasi kemasyarakatan dan untuk sebagian lagi menyangkut edukasi keagamaan. Dalam kerangka dua dimensi hidup orang beriman ini, kita bisa berbicara mengenai partisipasi dan transformasi dengan bertanya: apakah nilai-nilai kemasyarakatan memberi sumbangan kepada hidup sebagai jemaat; dan sebaliknya: apakah nilai hidup sebagai jemaat memberi sumbangan pada hidup kemasyarakatan.[8]

Tujuan pendidikan kaum beriman diarahkan pada kehidupan jemaat yang memiliki vitalitas. Maka, pendidikan mengembangkan bukan pertama-tama aspek kognitif, yakni pengetahuan jemaat mengenai

agama atau kemasyarakatan, melainkan terutama membentangkan suatu ruang gerak di mana kaum beriman bersama dengan anggota masyarakat yang lain membangun hidup yang lebih baik. Di situ, akan terjadi suatu proses *learning by doing*. Di situ, seorang *leader* berperan, dengan menjaga dan memfasilitasi supaya proses *learning by doing* tetap berlangsung terus sehingga proses pendidikan itu mencapai tujuannya. Supaya dapat menjalankan peran tersebut, seorang *leader* perlu mempunyai visi yang jelas (baik teologis maupun sosio-antropologis) agar menjadi *partner* partisipasi dan transformasi yang baik, dan agar ia tidak bingung mengikuti proses tersebut.

Konsekuensi Pastoral

Dalam diskusi teologis-pastoral, pokok-pokok ini sebenarnya bukan hal baru, bahkan telah dirumuskan sebagai imperatif pastoral dalam butir-butir pernyataan FABC pada pertemuan di Bandung, 17 – 27 Juli 1990.[9] Butir-butir tersebut mengarahkan pastoral dalam tiga bidang: mewartakan iman, mengabdi kepada masyarakat (Asia), dan memperdalam iman. Tetapi, apa yang sudah jelas itu baru berarti bila akhirnya mendapat bentuk dalam praksis pastoral, sekurang-kurangnya di tingkat paroki atau di kelompok-kelompok jemaat yang *de facto* hidup. Sehubungan dengan yang terakhir ini, mungkin dapat dikatakan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, berkaitan dengan pengelolaan paroki. Dewasa ini, kehidupan dan pengelolaan paroki-paroki sangat bervariasi, dan umumnya paroki-paroki dikelola menurut asas kepemimpinan yang bercorak karismatis, yaitu tergantung pada karisma tokoh-tokoh, *a.l.* dan terutama pastor. Maka, pembahasan mengenai iklim partisipasi dan transformasi sering dikaitkan dengan *style of pastoring,* yakni corak kepemimpinan tersebut. Ada yang mengkategorikan gaya kepemimpinan dalam 5 *style,* yang terbentang dari gaya otoriter sampai dengan gaya "pastor menganggur", seperti dalam penelitian oleh Thomas Sweeter SJ dan Carol Wisniewski Holden.[10] Dalam gaya otoriter, partisipasi merupakan "kemurahan" dari pimpinan, terikat pada kehendak pemimpin; dan di ekstrem lain (yakni dalam "pastor menganggur") partisipasi menjadi tidak terarah dan berjalan semau-maunya.

Kedua, di dunia modern ini, paroki tidak mungkin lagi dikelola sebagai sistem tertutup, tetapi menjadi sistem terbuka sebagaimana diusulkan oleh P.G. Van Hooijdonk, yakni sebagai paroki yang peduli akan hidup gerejawi dan hidup kemasyarakatan yang mengelilinginya.[11]

Gambar paroki tidak lagi baku, stereotip, dan seragam, tetapi paroki berubah, menjadi kreatif, dan aktual. Jadi, untuk mengembangkan iklim partisipasi dan transformasi, perlu ditinjau kembali sistem pengelolaan paroki-paroki. Dalam hal itu, penggalangan kelompok-kelompok basis menjadi salah satu kemungkinan yang real.[12]

Ketiga, pemberdayaan lembaga-lembaga yang sudah ada, yakni lembaga-lembaga dalam paroki teritorial seperti dewan paroki atau lembaga-lembaga kategorial yang berkaitan dengan karya kerasulan tertentu. Partisipasi dan transformasi bukan hanya urusan perorangan-individual. Lembaga-lembaga itu bagaikan wadah dan tempat, di mana jemaat berkiprah menurut karisma masing-masing, mengembangkan diri demi keseluruhan Gereja (*bdk.* 1Kor 12:7). Tetapi, pemberdayaan lembaga-lembaga itu, lebih-lebih lembaga-lembaga teritorial, harus disertai dengan penyesuaian kultur kepemimpinan agar kepemimpinan lebih diarahkan pada pemberdayaan lembaga-lembaga tersebut, dan bukan sebaliknya.

Keempat, pola pastoral "Lintas SARA". Untuk konteks Asia, khususnya Indonesia, "Lintas SARA" ini tidak lagi merupakan semacam kemungkinan terbuka melainkan suatu tuntutan. Hidup jemaat berkoeksistensi dalam masyarakat majemuk. Dalam hidup sehari-hari, jemaat terlibat dalam suatu perjuangan demi hidup bersama yang lebih baik. Paradigma pastoral baru yang partisipatif dan transformatif harus menampung hidup jemaat itu. Paradigma baru itu dapat mengandalkan kemampuan jemaat untuk membangun jaringan relasi (formal, informal, aksidental, spontan, individual, *grass-root level*) dengan berbagai kelompok dan kalangan. Konsep pastoral lama sebagai *cura animarum* dan *menggembalakan umat* yang bernada tertutup karena hanya peduli pada kelompok sendiri, harus mendapat isi yang semakin lengkap (multidimensional). Pastoral turut peduli pada proses *humanisasi* dunia dan manusia, dan jangkauan pastoral menjadi lebih luas. Dalam praksis pastoral, kaum awam mesti mendapatkan peranan lebih luas yang dibina dalam proses *learning by doing.*

CATATAN

1 Evealyn Eaton Whitehead, "Kepemimpinan dan Kekuasaan: Sebuah Tinjauan dari Ilmu-ilmu Sosial", dlm. Michael A. Cowan, *Kepemimpinan dalam Jemaah* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 51–94.

2 Mengenai paroki sebagai komunitas jemaat modern dan tuntutannya, bisa dibaca Ferd. Haselaars Hartono, *Paroki 2000* (Yogyakarta: Kanisius, 2000).

3 E. Gerrit Singgih, *Reformasi dan Transformasi Pelayanan Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 1997).

4 A. Sudiarja (ed.), *Tinjauan Kritis atas Gereja Diaspora Romo Mangunwijaya* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

5 Douglas J. Elwood, *Teologi Kristen Asia* (Jakarta: BPK, 1992).

6 P.G. van Hooijdonk, *Batu-batu yang Hidup* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 14.

7 *Bdk.* Joe Holland – Peter Henriot, *Analisis Sosial & Refleksi Teologis* (Yogyakarta: Kanisius, 1986)

8 Secara lebih luas, tema ini dibahas dalam *Gaudium et Spes*, Bagian II, Bab IV.

9 *Spektrum* XIX (1991) 2–4, 83–113.

10 Thomas Sweetser & Carol Wisniewski Holden, *Leadership in a Succesfull Parish* (San Francisco: Harper and Row, 1987), hlm. 15–24.

11 P.G. van Hooijdonk, *op.cit.*, hlm. 119–125 dan 189st.

12 *Bdk.* J.B. Banawiratma, *Hidup Menggereja yang Terbuka*, manuskrip.